



# Percepat Bayar Parkir dengan QRIS

Hasto Wardoyo  
soal Parkir Nuthuk  
Terus Terulang

**JOGJA** - Kasus parkir *nuthuk* (tarif di luar batas wajar, *Red*) yang kembali ramai mendapat perhatian kepala daerah. Mengantisipasi kasus seperti itu terus terjadi, sistem pembayaran parkir secara digital pun akan diterapkan ■

*Baca Percepat... Hal 7*

**PAKAI QRIS SAJA:** Juru parkir melayani pengendara motor yang memarkirkan kendaraan di kawasan parkir Jalan Prof Yohanes, Jogja, kemarin (21/7). Mengantisipasi parkir nuthuk, Pemkot Jogja akan menyiapkan pembayaran digitalisasi menggunakan QRIS di seluruh kawasan parkir secara bertahap.



# Percepat Bayar Parkir dengan QRIS

Sambungan dari hal 1

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, permasalahan parkir *nuthuk* memang menjadi salah satu atensi pihaknya.

Diikuti sudah banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan tentang penerapan tarif parkir di luar aturan.

Misalnya penggunaan tarif parkir oleh oknum juru parkir (jukir) yang terlalu mahal. Sehingga kemudian memberatkan pengguna fasilitas parkir bagi wisatawan. Bahkan tidak terkecuali masyarakat lokal di lingkungannya sendiri.

Seperti kasus yang menimpa RM Andretta Christaldi di Jalan Margo Utomo (dulu Jalan P. Mangkubumi), Gowongan, Jetis. Warga Ndalem Suryowijayan, Mantri Jeron, Kota Jogja itu dipatok parkir mobil Rp 15 ribu tanpa karcis resmi pada Jumat (17/7) malam.

"Saya berterimakasih sudah berani melapor," ujar Hasto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat kemarin (21/7).

Bupati Kulon Progo periode 2011-2019 itu menilai, langkah mengantisipasi terjadinya parkir *nuthuk* sudah disiapkan Pemkot lewat digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kebijakan itu akan diterap-

kan di seluruh kawasan parkir secara bertahap. Adapun sampai saat ini sudah 10 titik yang menerapkan pembayaran digital itu. Meliputi Jalan Prof Yohanes, Urip Sumoharjo, Diponegoro, Brigjen Katamsa, Mataram, Laksda Adisucipto, Ahmad Dahlan, Limaran, TPK Senopati dan Ngabean.

"Salah satu yang kami ingin dorong betul adalah QRIS untuk parkir di jalan, karena (parkir tunai) memang banyak masalah," jelas Hasto.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho menyebut, lewat penerapan parkir digital diharapkan tidak ada lagi perdebatan soal tarif.

Sekaligus menjadi salah satu upaya untuk membentuk birokrasi yang lebih detail dan transparan.

Menurut Arif, retribusi parkir digital menggunakan QRIS itu juga dapat mempermudah masyarakat karena proses pembayarannya lebih cepat dan dipastikan dapat sesuai peraturan. Misalnya tarif parkir tepi jalan umum (TJU) untuk kawasan 2 dan 3 bagi sepeda motor hanya Rp. 1.000 lalu mobil Rp. 2.000.

Sementara untuk lokasi parkir yang masuk kawasan I seperti di Jalan Margo Utomo, sepeda motor dibebankan tarif Rp. 2.000 dan mobil Rp. 5.000. Tarif bisa lebih besar tergantung jenis

kawasan parkir lain dan ukuran kendaraan.

"Lewat pembayaran digital dapat mengantisipasi pungutan liar dari para jukir nakal dengan modus tidak ada kembalian atau membebaskan tarif parkir tidak sesuai aturan," jelas Arif.

## DPRD Segera Panggil Dishub

Kasus parkir *nuthuk* di Jalan Margo Utomo ini juga menjadi sorotan legislatif. Komisi C DPRD Kota Jogja menilai harus ada peningkatan pengawasan dan keberanian korban untuk melapor.

Ketua Komisi C Bambang Seno Baskoro mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) terkait masih adanya kasus parkir *nuthuk*. Pemanggilan itu bertujuan agar legislatif menerima penjelasan lengkap, serta menuntut evaluasi dari Pemkot Jogja.

Seno menilai, persoalan parkir *nuthuk* merupakan permasalahan yang terus berulang di Kota Jogja. Sehingga dia mendesak agar ada upaya pengawasan yang lebih masif dari Pemkot.

"Seharusnya kasus parkir yang tidak sesuai aturan ini tidak boleh terjadi di Kota Jogja, karena akan mencoreng kota tujuan wisata," ujarnya lewat sambutan telepon, ke-

marin (21/7).

Menurut politisi Partai Golkar itu, terus berulangnya kasus parkir *nuthuk* di Kota Jogja karena dua kemungkinan. Pertama, kurangnya keberanian dari pengguna fasilitas atau korban parkir *nuthuk* untuk melapor kepada instansi terkait.

Kemungkinan kedua, kata Seno, belum optimalnya pengawasan dari Dishub Kota Jogja terhadap aktivitas parkir. Misalnya, masih kurang dalam melakukan patroli pada kawasan wisata yang rawan parkir *nuthuk* karena keterbatasan personel.

Ia memandang perlu ada inovasi kebijakan agar kasus parkir *nuthuk* tidak terus berulang. Salah satu yang disarankan adalah menerapkan karcis parkir berhadiah kepada pengguna fasilitas parkir. Lewat kebijakan itu akan mendorong masyarakat untuk meminta karcis resmi dari petugas.

"Selama ini banyak pengguna parkir tidak pernah menerima tiket tanda parkir, sehingga tarifnya tidak sesuai aturan. Kalau ada hadiah *karcis* bisa menjadi daya tarik untuk meminta tiket," sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengaku sudah berkoordinasi dengan Dishub Kota Jogja. Sehingga langkah pe-

nyelidikan kasus parkir *nuthuk* tengah berjalan.

Dodi menyebut, pihaknya juga telah merencanakan upaya penindakan terhadap aktivitas parkir *nuthuk* di

kawasan Malioboro. Termasuk siap menyeret pelaku ke meja hijau jika memang terbukti melakukan tindakan pengenaan tarif di luar ketentuan itu.

Lantaran tindakan tersebut melanggar Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2019. "Pelanggarnya bisa dikenakan sanksi pidana," ungkap Dodi. (inu/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005